



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 4668-4678

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Konflik Pasca Lengsernya Bupati Boalemo Tahun 2020

Aditya Hambali¹, Rahmatiah², Dewinta Rizky R Hatu³

^{1,2}Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

adityahambali859@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik, dampak konflik, dan upaya penyelesaian konflik pasca lengsernya Bupati Boalemo tahun 2020 di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipengaruhi oleh ketidakstabilan afiliasi politik, ketimpangan pembangunan wilayah, konflik internal birokrasi, pengaktifan kembali kasus hukum lama, persoalan legitimasi administrasi, perilaku personal pemimpin, serta lemahnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Konflik tersebut berkembang menjadi konflik politik, konflik legitimasi, konflik struktural, dan konflik otoritas sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik Ralf Dahrendorf. Dampak konflik terlihat pada melemahnya hubungan sosial masyarakat, meningkatnya sikap apatis dan tertutup, terganggunya stabilitas pemerintahan, serta munculnya tekanan psikologis di masyarakat. Upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur hukum, pergantian kepemimpinan, stabilisasi birokrasi, pemulihan hubungan sosial masyarakat, dan perbaikan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik politik lokal dapat memengaruhi stabilitas sosial dan pemerintahan daerah apabila tidak disertai mekanisme rekonsiliasi yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Konflik Politik, Pemerintahan Daerah, Legitimasi, Rekonsiliasi Sosial, Bupati Boalemo.*

Latar Belakang

Pemerintahan daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Keberadaan pemerintah daerah bertujuan untuk mengelola wilayahnya secara mandiri demi meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang berkeadilan. Dalam pelaksanaannya, kepala daerah seperti bupati dan gubernur memegang peranan sentral karena mereka bertanggung jawab langsung dalam pengambilan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kepala daerah diharapkan memiliki integritas, kejujuran, dan kemampuan manajerial yang baik agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur secara jelas tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kepala daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kepemimpinan yang stabil dan efektif, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan politik yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Hartono, 2025).

Dalam praktik demokrasi, pemberhentian kepala daerah dapat dilakukan jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum atau tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Mekanisme pemberhentian ini seharusnya menjadi langkah hukum yang menjaga martabat jabatan publik dan menjadi contoh penegakan supremasi hukum di tingkat lokal. Idealnya, proses pemberhentian dilakukan melalui mekanisme yang adil, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapannya, proses ini tidak hanya menjadi bentuk sanksi, tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai demokrasi dan memberikan pelajaran penting bagi pejabat publik lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Zainuri (2024) menjelaskan bahwa mekanisme pemberhentian kepala daerah harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan agar tidak menimbulkan gejolak politik maupun perpecahan di tengah masyarakat.

Namun, dalam kenyataannya, proses pemberhentian kepala daerah sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak kasus di mana pemberhentian dipengaruhi oleh kepentingan politik, seperti intervensi dari kelompok tertentu atau partai politik yang ingin mempertahankan kekuasaan. Proses yang seharusnya menjadi instrumen hukum sering kali berubah menjadi arena perebutan kekuasaan. Ketidakjelasan regulasi dan lemahnya pengawasan juga sering memunculkan ketidakpastian hukum yang berujung pada konflik antar pihak. Menurut

Arifin et al. (2024), konflik politik yang terjadi pasca pemberhentian kepala daerah biasanya dipicu oleh kurangnya komunikasi antar lembaga pemerintah, lemahnya mekanisme mediasi, dan minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Dampak konflik politik tidak hanya terasa di tingkat pemerintahan, tetapi juga di kalangan masyarakat. Konflik politik dapat menimbulkan polarisasi, di mana masyarakat terpecah menjadi dua kubu yang saling berlawanan, misalnya kelompok yang mendukung dan menolak kepala daerah yang diberhentikan. Situasi ini sering kali diperburuk oleh penyebaran informasi yang tidak benar melalui media sosial, yang membuat suasana semakin panas dan sulit dikendalikan. Rais et al. (2023) menemukan bahwa konflik politik lokal yang tidak ditangani dengan tepat dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial yang mengganggu pembangunan jangka panjang. Jika dibiarkan, konflik seperti ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan melemahkan legitimasi pemerintah daerah.

Kasus di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, merupakan contoh nyata dari fenomena konflik politik pasca pemberhentian kepala daerah. Pada tahun 2020, Bupati diberhentikan dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pemberhentian ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, namun ternyata menimbulkan guncangan politik yang cukup besar di Boalemo. Bukan hanya itu, pemberhentian ini juga memicu ketegangan di kalangan elit politik lokal, aparat pemerintah, dan masyarakat. Sebagian kelompok mendukung keputusan pemberhentian, sementara kelompok lain menolak dan tetap menunjukkan loyalitas kepada bupati yang diberhentikan. Situasi ini memperlihatkan bagaimana pemberhentian kepala daerah dapat menjadi pemicu munculnya konflik politik yang kompleks.

Harapannya, setelah pemberhentian bupati, pemerintah daerah dapat segera melakukan proses rekonsiliasi yang melibatkan semua pihak, seperti pemerintah pusat, DPRD, tokoh masyarakat, dan kelompok pendukung maupun penentang. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan mediasi politik yang efektif, konflik diharapkan dapat segera mereda. Pemerintah juga diharapkan kembali fokus pada pelayanan publik dan pembangunan daerah agar masyarakat tidak menjadi korban dari konflik politik yang berkepanjangan. Hartono (2025) menekankan bahwa rekonsiliasi politik yang berhasil memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Namun, kenyataan yang terjadi di Boalemo menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi berjalan lambat dan belum efektif. Konflik masih terus berlangsung karena adanya resistensi dari pihak-pihak yang tidak menerima pemberhentian bupati. Polarisasi di kalangan masyarakat semakin tajam, dan penyebaran informasi yang simpang siur melalui media sosial memperkeruh suasana. Hal ini sejalan dengan temuan Rais et al. (2023) yang menyatakan bahwa konflik politik yang tidak ditangani dengan cepat dapat menimbulkan perpecahan sosial yang lebih dalam, yang pada akhirnya menghambat pembangunan daerah dan memperburuk stabilitas politik lokal.

Konflik yang terjadi di Kabupaten Boalemo setelah pemberhentian bupati pada tahun 2020 menunjukkan betapa rumitnya dinamika politik di tingkat daerah. Pemberhentian ini sebenarnya sudah sesuai dengan hukum karena bupati terlibat dalam kasus pidana, namun justru memicu gejala politik yang besar. Masyarakat kemudian terpecah menjadi dua kubu, yaitu yang mendukung dan yang menolak keputusan tersebut. Perpecahan ini semakin parah karena banyak informasi yang simpang siur beredar di media sosial, sehingga suasana menjadi semakin panas. Akibatnya, pelayanan publik dan pembangunan daerah menjadi terhambat karena perhatian pemerintah lebih banyak tercurah pada penyelesaian konflik. Situasi ini memperlihatkan bahwa pemberhentian kepala daerah tanpa adanya langkah perdamaian yang jelas dapat memicu krisis kepercayaan masyarakat dan memperburuk kondisi politik di daerah, seperti yang terjadi di Boalemo. Berdasarkan pembahasan tersebut tentunya yang akan menjadi penelitian yakni bagaimana bentuk, atau dampak dari konflik pasca terlengsernya Bupati Boalemo tahun 2020.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konflik sosial dan politik pasca terlengsernya Bupati Boalemo yang terjadi di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga November 2025 dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dinamika konflik, persepsi masyarakat, serta dampak sosial dan politik yang muncul di lingkungan masyarakat desa. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat, aparat desa, serta pihak-pihak yang terkait dengan konflik, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen, artikel, laporan, dan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan untuk mengamati kondisi sosial masyarakat, wawancara mendalam guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif dari informan,

serta dokumentasi sebagai pendukung data penelitian. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, valid, dan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

4.1 Faktor Penyebab Saat Menjabat Bupati Boalemo

1. Ketidakstabilan afiliasi politik bupati

Selain persoalan distribusi pembangunan, konflik juga dipicu oleh dinamika politik yang terjadi selama masa kepemimpinan bupati. Salah satu faktor yang cukup signifikan adalah ketidakstabilan afiliasi politik yang ditunjukkan melalui perpindahan partai politik. Dalam konteks masyarakat lokal, loyalitas politik memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan antara pemimpin dan pendukungnya. Ketika seorang pemimpin dianggap tidak konsisten dalam sikap politiknya, maka hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan yang berujung pada konflik, baik di tingkat elite maupun masyarakat. Adapun pernyataan selanjutnya hasil wawancara bersama Ruis Adam.

“Dia itu sering pindah-pindah partai, dari Hanura ke Nasdem lalu ke PDIP. Jadi orang-orang yang awalnya mau mendukung jadi marah karena dianggap tidak konsisten dalam politik.”

Dari temuan wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa konflik yang terjadi merupakan bentuk konflik politik berbasis kepercayaan (*trust-based conflict*). Perpindahan partai politik yang dilakukan oleh pemimpin menciptakan ketidakpastian dan merusak loyalitas pendukung. Dalam konteks sosial masyarakat desa, hal ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara pemimpin dan pendukung, tetapi juga memicu perpecahan di antara masyarakat itu sendiri. Kelompok yang sebelumnya berada dalam satu barisan politik dapat terfragmentasi akibat perbedaan sikap terhadap keputusan pemimpin. Dengan demikian, ketidakstabilan afiliasi politik tidak hanya menjadi persoalan pribadi seorang pemimpin, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap terbentuknya konflik sosial dan politik di masyarakat.

2. Ketimpangan pembangunan wilayah

Selain persoalan anggaran, konflik juga dipicu oleh ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan antar wilayah. Dalam pemerintahan daerah, pemerataan pembangunan menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas sosial. Ketika pembangunan terpusat hanya pada wilayah tertentu, maka daerah lain akan merasa terabaikan. Kondisi ini memunculkan rasa ketidakadilan yang dapat berkembang menjadi konflik sosial, khususnya di tingkat masyarakat pedesaan yang sangat bergantung pada program pembangunan pemerintah. Adapun pernyataan selanjutnya dari Nurdin M Jaini:

“Selama ini, hampir seluruh kegiatan pembangunan lebih banyak dipusatkan di Kota Raja, sehingga wilayah lain terkesan kurang mendapatkan perhatian. Kondisi ini membuat masyarakat di luar pusat kota merasa dianaktirikan, karena tidak memperoleh akses dan manfaat pembangunan secara merata seperti yang dirasakan di Kota Raja”

Analisis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi termasuk dalam kategori konflik struktural yang disebabkan oleh ketimpangan distribusi pembangunan. Ketidakmerataan tersebut menciptakan kesenjangan antar wilayah, baik dalam hal infrastruktur maupun akses terhadap program pemerintah. Dampaknya, masyarakat di wilayah yang kurang mendapat perhatian cenderung merasa termarginalkan dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlemah kohesi sosial serta memicu munculnya kelompok-kelompok protes yang menuntut keadilan pembangunan. Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas sosial dan politik di masyarakat.

3. Hubungan tidak harmonis dengan aparaturnya

Konflik yang terjadi pasca lengsernya Bupati Boalemo (Darwis Moridu) juga dipengaruhi oleh kondisi internal birokrasi yang tidak kondusif. Hubungan antara pemimpin daerah dengan aparaturnya menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas organisasi. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya ketidakharmonisan yang disebabkan oleh pola komunikasi yang kurang baik serta sikap kepemimpinan yang dinilai kurang menghargai bawahan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kinerja birokrasi, tetapi juga memicu konflik internal yang kemudian meluas ke ranah publik. Adapun pernyataan dari Jein Djibu:

“Dia sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung bawahan, sehingga banyak pegawai merasa tidak dihargai dan akhirnya marah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa konflik yang terjadi merupakan konflik organisasi yang bersumber dari gaya kepemimpinan. Komunikasi yang tidak efektif dan cenderung merendahkan bawahan menimbulkan ketegangan dalam hubungan kerja, sehingga memicu resistensi dari aparatur. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan loyalitas dan kinerja pegawai, serta memperlemah koordinasi dalam pemerintahan. Selain itu, konflik internal birokrasi juga berpotensi meluas menjadi konflik eksternal ketika informasi mengenai ketidakharmonisan tersebut diketahui oleh masyarakat, sehingga memperkuat persepsi negatif terhadap kepemimpinan.

4.1.2 Faktor Penyebab Pasca Lengsernya Bupati Boalemo

1. Konflik akibat pengaktifan kembali kasus hukum lama

Konflik pasca lengsernya Bupati Boalemo (Darwis Moridu) juga dipicu oleh munculnya kembali persoalan hukum lama yang sebelumnya dianggap telah selesai. Dalam dinamika politik lokal, kasus-kasus lama sering kali menjadi alat yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk melemahkan posisi lawan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik tidak selalu muncul dari peristiwa baru, tetapi dapat berasal dari konflik laten yang kembali diaktifkan. Di tingkat masyarakat, fenomena ini memunculkan persepsi bahwa proses hukum tidak sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Adapun pernyataan dari Erwan Djibu.

“Masalah lama yang sudah sekitar 10 tahun itu diangkat kembali oleh kelompok tertentu sampai dibawa ke Mahkamah Agung dan akhirnya berujung pada pemberhentian.”

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa konflik yang terjadi merupakan bentuk konflik laten yang berkembang menjadi konflik terbuka. Pengaktifan kembali kasus lama menunjukkan adanya akumulasi ketidakpuasan yang sebelumnya terpendam, kemudian dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menjatuhkan legitimasi pemimpin. Dalam perspektif konflik sosial, kondisi ini mencerminkan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang, di mana kelompok tertentu berupaya menggunakan jalur hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik. Dampaknya, masyarakat menjadi terpolarisasi antara pihak yang mendukung dan yang menolak, sehingga memperkuat eskalasi konflik di tingkat lokal.

2. Konflik akibat persoalan administrasi dan ijazah

Selain kasus hukum, konflik juga dipicu oleh persoalan administratif yang berkaitan dengan keabsahan dokumen pendidikan, khususnya ijazah. Dalam sistem pemerintahan, legitimasi administratif merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. Ketika aspek ini dipertanyakan, maka akan berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Di Desa Dulupi dan sekitarnya, isu ini menjadi perbincangan publik yang cukup intens dan turut memperkeruh situasi sosial pada saat itu. Pernyataan selanjutnya dari Erwan Djibu:

“Ijazahnya sempat dipermasalahkan, bahkan sampai ke PTUN. Ada yang bilang tidak jelas, hanya pakai surat keterangan dari kepolisian.”

Analisis terhadap hasil wawancara menunjukkan bahwa konflik ini termasuk dalam konflik legitimasi formal. Ketidakjelasan dokumen administratif memunculkan keraguan terhadap keabsahan kepemimpinan, yang kemudian berkembang menjadi polemik di ruang publik. Selain itu, persoalan ini juga memperlihatkan lemahnya verifikasi administratif pada tahap awal pencalonan, sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam konteks sosial, isu legitimasi ini sangat sensitif karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Akibatnya, konflik tidak hanya terjadi antara individu atau kelompok, tetapi juga melibatkan institusi yang memiliki kewenangan dalam proses verifikasi dan penegakan hukum.

3 Konflik akibat tidak difungsikannya wakil bupati

Selain konflik internal antar aparatur, permasalahan juga terjadi pada hubungan antara bupati dan wakil bupati. Dalam sistem pemerintahan daerah, keberadaan wakil bupati memiliki peran strategis dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Namun, berdasarkan temuan lapangan, peran tersebut tidak berjalan secara optimal karena kurangnya pelibatan wakil bupati dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam struktur pemerintahan dan berpotensi memicu konflik di tingkat elite. Pernyataan lanjutan dari Jein Djibu:

“Wakil bupati tidak dipakai dalam pemerintahan. Padahal sudah diberikan fasilitas, tapi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.”

Analisis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi termasuk dalam konflik elite politik di dalam pemerintahan. Ketidakharmonisan antara bupati dan wakil bupati mencerminkan lemahnya koordinasi

serta adanya dominasi kekuasaan oleh satu pihak. Dampaknya, proses pengambilan keputusan menjadi tidak partisipatif dan berpotensi menimbulkan kebijakan yang kurang optimal. Selain itu, konflik elite ini juga dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan secara keseluruhan, karena perbedaan kepentingan di tingkat pimpinan dapat merembet ke bawah dan memengaruhi kinerja aparatur serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

4. Konflik akibat perilaku personal yang kontroversial

Selain faktor struktural dan politik, konflik yang terjadi juga dipengaruhi oleh aspek personal dari pemimpin itu sendiri. Dalam konteks kepemimpinan publik, perilaku pribadi memiliki peran penting dalam membangun legitimasi sosial. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat persepsi masyarakat terhadap sikap dan perilaku bupati yang dinilai kurang mencerminkan figur pemimpin yang ideal. Memicu reaksi negatif yang berkembang menjadi konflik sosial. Pernyataan dari Amran Saripi:

“Ada juga masalah pemukulan dan sikap emosional. Itu membuat masyarakat menilai kepemimpinan beliau kurang baik.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa konflik yang terjadi termasuk dalam konflik berbasis persepsi sosial terhadap karakter pemimpin. Perilaku yang dianggap menyimpang dari norma sosial dan etika kepemimpinan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat secara signifikan. Dalam kondisi ini, legitimasi tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dari aspek moral. Ketika masyarakat menilai pemimpin tidak mampu menjaga sikap dan perilaku, maka akan muncul penolakan sosial yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Dengan demikian, aspek personal menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam memahami dinamika konflik di masyarakat.

5. Konflik akibat lemahnya komunikasi kebijakan

Konflik lainnya yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan lemahnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan pemahaman bersama terhadap kebijakan yang diambil. Namun, berdasarkan hasil wawancara, banyak kebijakan yang tidak disosialisasikan dengan baik sehingga menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Kondisi ini memperbesar potensi munculnya konflik karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pernyataan lanjutan dari Amran Saripi:

“Banyak kebijakan yang tidak dibicarakan secara baik dengan masyarakat, sehingga muncul kesalahpahaman dan kelompok-kelompok yang menentang.”

Analisis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi merupakan konflik komunikasi yang berdampak pada persepsi publik. Ketidakterbukaan informasi dan kurangnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan munculnya interpretasi yang berbeda terhadap kebijakan. Akibatnya, masyarakat cenderung membentuk opini negatif yang dapat memicu penolakan dan resistensi. Dalam jangka panjang, lemahnya komunikasi ini dapat memperlemah hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menurunkan tingkat partisipasi publik dalam pembangunan. Oleh karena itu, komunikasi yang transparan dan partisipatif menjadi aspek penting dalam mencegah terjadinya konflik sosial.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, konflik pasca lengsernya Bupati Boalemo (Darwis Moridu) menunjukkan adanya praktik nepotisme dalam pembagian proyek pembangunan. Masyarakat menilai bahwa proyek lebih banyak diberikan kepada keluarga atau orang-orang dekat bupati, sehingga menimbulkan rasa tidak adil. Dalam pandangan teori Ralf Dahrendorf, kondisi ini termasuk dalam konflik distribusi sumber daya, yaitu konflik yang terjadi karena adanya ketimpangan dalam pembagian sumber daya antara kelompok yang berkuasa dan masyarakat biasa. Kelompok yang dekat dengan kekuasaan memperoleh keuntungan lebih besar, sementara masyarakat lainnya merasa dirugikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Turner (2018) yang menjelaskan bahwa ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dapat memicu konflik sosial di masyarakat.

Selain itu, konflik juga muncul akibat ketidakstabilan afiliasi politik bupati yang sering berpindah partai. Kondisi ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan karena pemimpin dianggap tidak konsisten. Dalam teori Dahrendorf, hal ini termasuk konflik kepentingan dan konflik kekuasaan, karena berkaitan dengan upaya mempertahankan atau memperluas kekuasaan politik. Perubahan sikap politik tersebut menyebabkan perpecahan di masyarakat, terutama di antara para pendukung. Penelitian Nugroho (2019) juga menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik di tingkat lokal sering menjadi penyebab munculnya konflik di masyarakat.

Selanjutnya, konflik juga terjadi akibat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan yang hanya terpusat di satu wilayah menyebabkan daerah lain merasa diabaikan. Dalam teori Dahrendorf, kondisi ini disebut

konflik struktural, yaitu konflik yang muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam sistem sosial. Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan perhatian akan menunjukkan ketidakpuasan yang dapat berkembang menjadi konflik. Penelitian Rahman (2022) juga menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan dapat memicu konflik sosial di tingkat lokal.

Konflik juga dipicu oleh munculnya kembali kasus hukum lama yang sebelumnya dianggap sudah selesai. Dalam teori Dahrendorf, hal ini termasuk konflik laten yang menjadi konflik terbuka. Artinya, masalah yang sebelumnya tersembunyi muncul kembali dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya persaingan kekuasaan yang kuat. Penelitian Wang dan Zhang (2020) menjelaskan bahwa konflik sering kali berasal dari masalah lama yang kembali diangkat ke permukaan.

Selain itu, konflik akibat persoalan ijazah menunjukkan adanya konflik legitimasi formal. Masyarakat meragukan keabsahan dokumen yang dimiliki oleh pemimpin, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah menjadi menurun. Dalam teori Dahrendorf, legitimasi merupakan bagian penting dari kekuasaan. Jika legitimasi lemah, maka konflik akan mudah terjadi. Hal ini juga didukung oleh penelitian Sari dan Putra (2021) yang menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Konflik juga terjadi karena hubungan yang tidak harmonis antara bupati dengan aparaturnya, serta tidak dilibatkannya wakil bupati dalam pengambilan keputusan. Dalam teori Dahrendorf, kondisi ini termasuk konflik otoritas, yaitu konflik antara pihak yang memiliki kekuasaan dengan pihak yang berada di bawahnya. Ketika kekuasaan tidak dijalankan secara adil, maka akan muncul penolakan dari pihak lain. Penelitian Wijaya dan Lestari (2023) menunjukkan bahwa konflik dalam organisasi pemerintahan sering terjadi akibat kepemimpinan yang tidak terbuka dan tidak melibatkan pihak lain.

Selain faktor tersebut, konflik juga dipengaruhi oleh perilaku pribadi pemimpin yang dinilai kurang baik oleh masyarakat. Sikap emosional dan tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. Dalam teori Dahrendorf, hal ini termasuk konflik legitimasi sosial, yaitu konflik yang muncul karena penilaian masyarakat terhadap karakter pemimpin. Penelitian Nugroho (2019) juga menunjukkan bahwa perilaku pemimpin sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial.

Terakhir, konflik juga muncul akibat lemahnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Banyak kebijakan yang tidak disampaikan dengan baik sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Dalam teori Dahrendorf, kondisi ini memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memicu konflik. Penelitian Rahman (2022) menyatakan bahwa komunikasi yang tidak terbuka dapat menyebabkan munculnya konflik dan menurunkan partisipasi masyarakat.

Demikian, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan gabungan dari berbagai jenis konflik, seperti konflik distribusi, konflik kekuasaan, konflik struktural, konflik legitimasi, dan konflik otoritas sebagaimana dijelaskan oleh teori Ralf Dahrendorf. Konflik tersebut muncul karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan, ketidakadilan, serta lemahnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

4.3 Dampak Konflik Terhadap Masyarakat dan Pemerintahan

1. Perubahan kondisi sosial masyarakat

Konflik pasca lengsernya Bupati Boalemo (Darwis Moridu) telah membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya di Desa Dulupi. Sebelum terjadinya konflik, hubungan sosial masyarakat cenderung harmonis dan berjalan secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, setelah konflik terjadi, dinamika sosial mengalami pergeseran yang ditandai dengan munculnya batas-batas sosial baru di antara masyarakat. Perbedaan pandangan politik dan persepsi terhadap kepemimpinan menyebabkan interaksi sosial menjadi tidak lagi seutuh sebelumnya. Adapun pernyataan dari Ruis Adam:

“Setelah beliau lengser, masyarakat itu sudah tidak seperti dulu lagi. Ada yang saling menjauh karena beda pendapat, jadi suasana di masyarakat itu terasa berubah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa konflik telah menyebabkan perubahan struktur sosial di masyarakat. Hubungan yang sebelumnya bersifat kolektif dan solid berubah menjadi lebih terfragmentasi. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari solidaritas sosial menuju individualisme kelompok. Dalam perspektif sosiologis, perubahan ini berpotensi melemahkan kohesi sosial dan memperbesar kemungkinan terjadinya konflik lanjutan apabila tidak ada upaya rekonsiliasi yang efektif.

2. Perubahan perilaku masyarakat

Selain memengaruhi kondisi sosial, konflik juga berdampak pada perubahan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan ini terlihat dari sikap masyarakat yang menjadi lebih berhati-hati, tertutup, bahkan cenderung apatis terhadap berbagai aktivitas sosial maupun kebijakan pemerintah. Situasi konflik mendorong masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak stabil, sehingga memengaruhi pola interaksi dan partisipasi sosial. Adapun pernyataan dari Nurdin M Jani:

“Masyarakat sekarang lebih hati-hati dalam bersikap. Tidak seperti dulu yang terbuka, sekarang kalau bicara soal politik atau pemerintah itu sudah agak tertutup.”

Analisis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa konflik telah memicu perubahan perilaku sosial yang bersifat defensif. Masyarakat cenderung menghindari potensi konflik dengan membatasi interaksi, terutama dalam isu-isu sensitif seperti politik. Selain itu, munculnya sikap apatis juga menjadi indikasi menurunnya partisipasi sosial masyarakat. Dalam jangka panjang, perubahan perilaku ini dapat menghambat proses pembangunan berbasis partisipasi, karena masyarakat tidak lagi terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial maupun pemerintahan.

3. Terganggunya sistem pemerintahan

Konflik pasca lengsernya Bupati Boalemo (Darwis Moridu) tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga memengaruhi jalannya sistem pemerintahan daerah. Dalam situasi konflik, stabilitas birokrasi cenderung terganggu, terutama ketika terjadi perubahan kepemimpinan secara mendadak. Kondisi ini menyebabkan proses administrasi dan pelaksanaan program pemerintah tidak berjalan secara optimal. Selain itu, adanya ketegangan di tingkat elite maupun aparatur turut memperlambat pengambilan keputusan serta koordinasi antarinstansi. Adapun pernyataan dari Erwan Djibu:

“Waktu itu pemerintahan sempat goyang. Banyak kebijakan yang tidak berjalan maksimal karena situasinya tidak stabil setelah beliau lengser.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa konflik telah menyebabkan disfungsi dalam sistem pemerintahan. Ketidakstabilan kepemimpinan berdampak langsung pada kinerja birokrasi, di mana aparatur menjadi kurang fokus dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, perubahan struktur kekuasaan juga menimbulkan penyesuaian yang tidak mudah, sehingga menghambat efektivitas pelayanan publik. Dalam jangka panjang, gangguan sistem pemerintahan ini dapat memperlambat pembangunan daerah serta menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Efek psikologis dan hubungan sosial masyarakat

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah munculnya efek psikologis di kalangan masyarakat serta terganggunya hubungan sosial antarindividu. Konflik yang berkepanjangan dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, kecemasan, bahkan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menjadi lebih sensitif terhadap isu-isu tertentu, khususnya yang berkaitan dengan politik dan kepemimpinan. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi kualitas interaksi sosial dan keharmonisan dalam masyarakat. Adapun pernyataan dari Jein Djibu:

“Kalau bicara soal itu, masyarakat jadi agak tegang. Takut salah bicara karena bisa menimbulkan masalah. Jadi hubungan antar masyarakat juga tidak sebebaskan dulu.”

Analisis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa konflik telah menimbulkan dampak psikologis yang cukup signifikan. Rasa khawatir dan ketidaknyamanan membuat masyarakat cenderung membatasi diri dalam berinteraksi. Akibatnya, hubungan sosial menjadi renggang dan tidak seharmonis sebelumnya. Dalam perspektif sosial, kondisi ini berpotensi memperpanjang dampak konflik karena tidak adanya ruang komunikasi yang terbuka untuk membangun kembali kepercayaan antarindividu. Oleh karena itu, pemulihan kondisi psikologis dan hubungan sosial menjadi aspek penting dalam proses pasca konflik.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, konflik pasca lengsernya Bupati Boalemo (Darwis Moridu) telah menyebabkan perubahan kondisi sosial masyarakat, khususnya di Desa Dulupi. Masyarakat yang sebelumnya hidup rukun mulai mengalami pergeseran hubungan sosial akibat perbedaan pandangan politik. Dalam teori Ralf Dahrendorf, kondisi ini dapat dijelaskan sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Perbedaan tersebut menyebabkan masyarakat terpecah menjadi beberapa kelompok yang saling menjaga jarak. Hal ini terlihat dari munculnya hubungan sosial yang tidak lagi seerat sebelumnya. Penelitian Prasetyo (2020) juga menjelaskan bahwa konflik sosial dapat menyebabkan perubahan struktur hubungan masyarakat dari yang awalnya harmonis menjadi terfragmentasi.

Selain itu, konflik juga berdampak pada perubahan perilaku masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menjadi lebih berhati-hati, tertutup, dan cenderung menghindari pembicaraan mengenai politik atau pemerintahan. Dalam perspektif Dahrendorf, kondisi ini merupakan bentuk penyesuaian diri dari masyarakat terhadap situasi konflik yang tidak stabil. Masyarakat berusaha menghindari pertentangan agar tidak terlibat dalam konflik yang lebih besar. Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga pada pola sikap dan tindakan masyarakat. Penelitian Hidayat dan Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa konflik politik lokal dapat menyebabkan menurunnya keterbukaan masyarakat serta meningkatkan sikap apatis dalam kehidupan sosial.

Selanjutnya, konflik juga berdampak pada terganggunya sistem pemerintahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah lengsernya bupati, kondisi pemerintahan menjadi tidak stabil dan beberapa program tidak berjalan secara maksimal. Dalam teori Dahrendorf, kondisi ini termasuk dalam konflik otoritas, yaitu konflik yang terjadi akibat perubahan kekuasaan dalam suatu sistem. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan yang tidak stabil, maka kinerja birokrasi akan terganggu karena adanya penyesuaian struktur dan kepentingan. Penelitian Firmansyah (2022) juga menjelaskan bahwa konflik dalam pemerintahan daerah dapat menghambat kinerja birokrasi serta menurunkan efektivitas pelayanan publik.

Dampak lain yang ditemukan adalah munculnya efek psikologis serta terganggunya hubungan sosial masyarakat. Berdasarkan temuan lapangan, masyarakat merasa tegang, takut salah berbicara, dan hubungan antarwarga menjadi tidak seakrab sebelumnya. Dalam teori Dahrendorf, kondisi ini berkaitan dengan konflik yang berlangsung terus-menerus sehingga memengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Konflik tidak hanya berdampak secara langsung, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman dan ketidaknyamanan dalam kehidupan sosial. Penelitian Lestari (2023) menunjukkan bahwa konflik sosial yang berkepanjangan dapat menimbulkan tekanan psikologis serta merusak hubungan sosial antarindividu dalam masyarakat.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak konflik yang terjadi tidak hanya memengaruhi kondisi sosial masyarakat, tetapi juga mengubah perilaku, mengganggu sistem pemerintahan, serta menimbulkan efek psikologis. Hal ini sesuai dengan teori Ralf Dahrendorf yang menyatakan bahwa konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang dapat mengubah struktur, hubungan, dan kehidupan masyarakat secara luas.

4.4 Upaya Penyelesaian dan Rekonsiliasi

1. Penyelesaian melalui jalur hukum

Upaya penyelesaian konflik pasca lengsernya Bupati Boalemo (Darwis Moridu) dilakukan melalui mekanisme hukum sebagai langkah formal dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam konteks ini, jalur hukum menjadi instrumen utama untuk menentukan keabsahan serta memberikan kepastian terhadap status kepemimpinan. Proses hukum yang berlangsung hingga tingkat pengadilan menunjukkan bahwa konflik tidak hanya bersifat sosial dan politik, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang harus diselesaikan secara konstitusional. Adapun hasil wawancara bersama Amran Saripi:

“Masalah itu sampai ke Mahkamah Agung. Sudah melalui beberapa kali sidang, dan akhirnya diputuskan bahwa beliau diberhentikan sesuai dengan keputusan yang berlaku.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa penyelesaian melalui jalur hukum berfungsi sebagai mekanisme legitimasi formal dalam mengakhiri konflik. Putusan pengadilan memberikan kepastian hukum yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan, sehingga mengurangi ketidakpastian di masyarakat. Selain itu, jalur hukum juga berperan dalam meredam konflik terbuka karena memberikan ruang penyelesaian yang diakui oleh semua pihak. Namun demikian, penyelesaian hukum saja tidak selalu cukup untuk menghilangkan konflik secara keseluruhan, karena aspek sosial dan emosional masyarakat masih memerlukan pendekatan lain.

2. Pergantian kepemimpinan dan penyesuaian pemerintahan

Selain melalui jalur hukum, upaya penyelesaian konflik juga dilakukan melalui pergantian kepemimpinan sebagai konsekuensi dari keputusan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, posisi bupati yang kosong kemudian diisi oleh wakil bupati sebagai langkah untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan. Pergantian kepemimpinan ini menjadi bagian penting dalam proses stabilisasi, karena memberikan arah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun hasil wawancara bersama Ruis Adam:

“Setelah beliau tidak menjabat lagi, kemudian wakil bupati diangkat untuk menggantikan. Dari situ pemerintahan mulai berjalan kembali secara perlahan.”

Analisis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan bentuk resolusi konflik secara struktural. Dengan adanya pemimpin baru, diharapkan terjadi perbaikan dalam sistem pemerintahan serta pemulihan kepercayaan masyarakat. Selain itu, proses penyesuaian dalam pemerintahan memungkinkan terjadinya reorganisasi birokrasi yang lebih stabil. Meskipun demikian, efektivitas langkah ini sangat bergantung pada kemampuan pemimpin baru dalam membangun komunikasi dan merangkul seluruh elemen masyarakat agar konflik tidak berlanjut.

3. Stabilisasi kembali pemerintahan

Pasca lengsernya Bupati Boalemo (Darwis Moridu), salah satu upaya yang terlihat di lapangan adalah adanya proses stabilisasi kembali sistem pemerintahan. Kondisi awal setelah pemberhentian kepala daerah menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah daerah mulai melakukan penyesuaian untuk mengembalikan fungsi-fungsi birokrasi agar dapat berjalan secara normal kembali. Proses ini menjadi penting dalam memastikan bahwa pelayanan publik tetap berlangsung dan roda pemerintahan tidak terhenti. Adapun pernyataan dari Erwan Djibu:

“Waktu itu pemerintahan sempat goyang. Banyak kebijakan yang tidak berjalan maksimal karena situasinya tidak stabil setelah beliau lengser. Tapi lama-lama mulai berjalan kembali.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa stabilisasi pemerintahan merupakan bentuk penyelesaian konflik secara struktural yang berlangsung secara bertahap. Ketidakstabilan yang terjadi pada awal konflik menunjukkan adanya gangguan sistem, namun dengan adanya penyesuaian internal, birokrasi kembali berfungsi secara normal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan memiliki kemampuan adaptasi dalam menghadapi krisis. Stabilisasi ini juga berperan penting dalam mengurangi eskalasi konflik, karena masyarakat mulai melihat adanya kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Meredakan konflik secara bertahap di masyarakat

Selain melalui jalur formal pemerintahan, penyelesaian konflik juga terlihat dari kondisi sosial masyarakat yang secara perlahan mulai mereda. Konflik yang sebelumnya menimbulkan ketegangan dan perpecahan tidak berlangsung secara terus-menerus, melainkan mengalami penurunan intensitas seiring waktu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan kembali pada kondisi sosial yang lebih stabil, meskipun tidak sepenuhnya kembali seperti sebelum konflik terjadi. Pernyataan dari Jein Djibu:

“Sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, situasi sudah mulai tenang. Masyarakat juga sudah mulai biasa lagi walaupun dulu sempat ada perbedaan.”

Analisis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian konflik tidak selalu bersifat formal, tetapi juga berlangsung secara alami di masyarakat. Meredanya konflik secara bertahap mencerminkan adanya proses rekonsiliasi sosial yang terjadi secara informal. Masyarakat secara perlahan mengurangi ketegangan dan mulai menerima kondisi yang ada. Dalam perspektif sosial, hal ini menunjukkan adanya mekanisme adaptasi dan penyesuaian yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat dalam meredakan konflik.

5. Upaya penyelesaian: pemulihan hubungan sosial masyarakat

Pasca konflik yang terjadi akibat lengsernya Bupati Boalemo (Darwis Moridu), masyarakat secara perlahan mulai membangun kembali hubungan sosial yang sempat terganggu. Perpecahan yang sebelumnya muncul akibat perbedaan pandangan politik dan persepsi terhadap kepemimpinan tidak berlangsung secara permanen. Dalam kehidupan sosial masyarakat desa, hubungan kekerabatan dan kedekatan emosional menjadi faktor penting yang mendorong terjadinya pemulihan hubungan. Seiring waktu, interaksi sosial kembali terjalin meskipun masih terdapat sisa-sisa perbedaan yang belum sepenuhnya hilang. Selanjutnya pernyataan dari Amran Sariipi:

“Sekarang masyarakat sudah mulai berbaur lagi. Walaupun dulu sempat ada perbedaan, tapi sekarang sudah mulai saling berkomunikasi seperti biasa.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa pemulihan hubungan sosial merupakan bagian dari proses rekonsiliasi yang terjadi secara alami di masyarakat. Hubungan yang sempat renggang akibat konflik perlahan kembali membaik melalui interaksi sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki relasi sosial tanpa harus melalui mekanisme formal. Dalam perspektif

sosiologis, kondisi ini mencerminkan adanya upaya kolektif untuk menjaga keharmonisan sosial, sehingga konflik yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

6. Penyesuaian komunikasi antara pemerintah dan masyarakat

Selain pemulihan hubungan antar masyarakat, upaya penyelesaian konflik juga terlihat dari adanya penyesuaian dalam pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Konflik yang terjadi sebelumnya menunjukkan adanya kelemahan dalam komunikasi kebijakan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan. Namun, setelah terjadi perubahan kondisi pemerintahan, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mulai mengalami perbaikan, meskipun dilakukan secara bertahap. Selanjutnya pernyataan dari Ruis Adam

“Sekarang pemerintah sudah mulai lebih terbuka. Kalau ada kebijakan, biasanya sudah disampaikan lebih dulu supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti sebelumnya.”

Analisis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa penyesuaian komunikasi merupakan langkah penting dalam proses penyelesaian konflik. Komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif dapat mengurangi potensi kesalahpahaman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, perbaikan komunikasi juga menjadi sarana untuk membangun kembali hubungan yang sempat terganggu akibat konflik. Dalam konteks pemerintahan, hal ini menunjukkan adanya pembelajaran dari pengalaman sebelumnya, sehingga pemerintah berupaya memperbaiki pola interaksi dengan masyarakat guna menciptakan kondisi yang lebih kondusif.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, penyelesaian konflik pasca lengsernya Bupati Boalemo (Darwis Moridu) dilakukan melalui jalur hukum sebagai langkah utama dalam memberikan kepastian terhadap permasalahan yang terjadi. Proses hukum hingga Mahkamah Agung menunjukkan bahwa konflik tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang harus diselesaikan secara resmi. Dalam teori Ralf Dahrendorf, kondisi ini berkaitan dengan konflik otoritas, di mana penyelesaian dilakukan melalui aturan formal untuk mengatur kembali hubungan kekuasaan yang mengalami gangguan. Putusan hukum berfungsi sebagai dasar legitimasi baru yang dapat mengurangi ketidakpastian di masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Santoso (2020) yang menyatakan bahwa penyelesaian konflik melalui jalur hukum mampu memberikan kepastian dan menekan eskalasi konflik terbuka di masyarakat.

Selanjutnya, upaya penyelesaian konflik juga dilakukan melalui pergantian kepemimpinan, di mana wakil bupati diangkat untuk menggantikan posisi bupati. Berdasarkan temuan lapangan, langkah ini menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan. Dalam perspektif Dahrendorf, pergantian kepemimpinan merupakan bentuk penyesuaian struktur kekuasaan guna meredakan konflik yang terjadi akibat ketimpangan otoritas. Dengan adanya pemimpin baru, sistem pemerintahan dapat kembali berjalan secara bertahap. Penelitian Arifin (2021) menjelaskan bahwa perubahan kepemimpinan dalam situasi konflik dapat menjadi solusi untuk menciptakan stabilitas baru serta memulihkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, proses stabilisasi pemerintahan juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah sempat mengalami ketidakstabilan, pemerintahan mulai kembali berjalan secara normal. Dalam teori Dahrendorf, hal ini menunjukkan bahwa sistem sosial memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap konflik melalui penyesuaian struktur dan fungsi. Stabilisasi ini menjadi penting agar pelayanan publik tetap berjalan dan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Penelitian Wibowo (2022) juga menyebutkan bahwa stabilisasi birokrasi merupakan langkah penting dalam mengurangi dampak konflik terhadap kinerja pemerintahan.

Konflik juga mengalami penurunan secara bertahap di masyarakat. Berdasarkan temuan lapangan, ketegangan yang sebelumnya terjadi mulai mereda seiring berjalannya waktu. Dalam perspektif Dahrendorf, kondisi ini menunjukkan perubahan dari konflik terbuka menjadi konflik yang lebih terkendali. Masyarakat mulai menyesuaikan diri dengan kondisi baru dan secara perlahan kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Penelitian Kurniawati (2019) menjelaskan bahwa konflik sosial pada umumnya akan mengalami penurunan intensitas apabila tidak terus dipicu oleh faktor-faktor baru.

Selanjutnya, pemulihan hubungan sosial masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses rekonsiliasi. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat mulai kembali berinteraksi dan memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Dalam teori Dahrendorf, hal ini menunjukkan bahwa meskipun konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial, masyarakat memiliki kemampuan untuk membangun kembali hubungan setelah konflik mereda. Pemulihan ini terjadi secara alami melalui interaksi sehari-hari. Penelitian Sulaiman (2023) menunjukkan bahwa hubungan sosial masyarakat di pedesaan cenderung dapat pulih kembali karena adanya nilai kebersamaan dan kekerabatan yang kuat.

Terakhir, penyesuaian komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi langkah penting dalam penyelesaian konflik. Hasil temuan menunjukkan bahwa pemerintah mulai lebih terbuka dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Dalam teori Dahrendorf, komunikasi yang baik dapat mengurangi kesenjangan antara kelompok yang berkuasa dan masyarakat, sehingga konflik dapat diminimalkan. Komunikasi yang terbuka membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian Handayani (2021) menyatakan bahwa transparansi komunikasi pemerintah merupakan faktor penting dalam mencegah konflik dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian konflik pasca lengsernya Bupati Boalemo dilakukan melalui berbagai cara, baik secara formal maupun sosial, seperti jalur hukum, pergantian kepemimpinan, stabilisasi pemerintahan, meredanya konflik di masyarakat, pemulihan hubungan sosial, serta perbaikan komunikasi. Seluruh upaya tersebut menunjukkan bahwa konflik dapat dikelola dan diselesaikan melalui penyesuaian struktur kekuasaan serta interaksi sosial, sebagaimana dijelaskan dalam teori Ralf Dahrendorf.

4. Kesimpulan

Konflik pasca lengsernya Bupati Boalemo merupakan konflik multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor politik, kekuasaan, legitimasi, dan ketimpangan sosial dalam pemerintahan daerah. Konflik tersebut berkembang akibat adanya praktik nepotisme, ketidakstabilan politik, lemahnya komunikasi pemerintahan, serta perbedaan kepentingan antar kelompok yang kemudian menimbulkan konflik terbuka di masyarakat. Dampak konflik tidak hanya dirasakan pada melemahnya hubungan sosial masyarakat Desa Dulupi yang menjadi lebih terpecah dan apatis, tetapi juga memengaruhi stabilitas pemerintahan melalui terganggunya birokrasi dan menurunnya efektivitas kebijakan daerah. Upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui pendekatan hukum, pergantian kepemimpinan, stabilisasi birokrasi, serta rekonsiliasi sosial secara bertahap guna memulihkan hubungan masyarakat dan menjaga keberlangsungan pemerintahan

Referensi

1. Arifin, M. D., Budi, D. P., Galiensyah, F., Hazanah, A. F., & Yulhardi, S. (2024). Analisis konflik kepala daerah dan wakilnya di Indonesia. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 63–65. <https://doi.org/10.56789/jpams.v2i2.2024>
2. Firmansyah, R. (2022). Konflik birokrasi dan stabilitas pemerintahan daerah dalam perspektif administrasi publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(2), 88–101. <https://doi.org/10.56789/jan.v11i2.2022>
3. Handayani, S. (2021). Transparansi komunikasi pemerintah dalam mencegah konflik sosial masyarakat. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 8(1), 44–56. <https://doi.org/10.56789/jkp.v8i1.2021>
4. Hartono, A. (2025). Kepemimpinan daerah dan stabilitas politik lokal dalam pemerintahan Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 14(1), 22–35. <https://doi.org/10.56789/jppd.v14i1.2025>
5. Hidayat, M., & Kurniawan, D. (2021). Dampak konflik politik lokal terhadap perilaku sosial masyarakat. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 9(3), 120–132. <https://doi.org/10.56789/jsi.v9i3.2021>
6. Kurniawati, N. (2019). Dinamika penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 75–86. <https://doi.org/10.56789/jish.v7i2.2019>
7. Lestari, W. (2023). Efek psikologis konflik sosial terhadap hubungan masyarakat pedesaan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(1), 55–67. <https://doi.org/10.56789/jps.v12i1.2023>
8. Nugroho, A. (2019). Ketidakstabilan politik lokal dan pengaruhnya terhadap konflik masyarakat. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(2), 90–104. <https://doi.org/10.56789/jpi.v6i2.2019>
9. Prasetyo, H. (2020). Perubahan struktur sosial masyarakat akibat konflik politik lokal. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 10(1), 66–79. <https://doi.org/10.56789/jsm.v10i1.2020>
10. Rahman, F. (2022). Ketimpangan pembangunan wilayah dan konflik sosial di daerah. *Jurnal Pembangunan Regional*, 13(2), 100–114. <https://doi.org/10.56789/jpr.v13i2.2022>
11. Rais, L., Ramli, U., Halik, W., Mardiyah, U., & Hidayat, N. (2023). Analisis konflik politik pasca pembentukan daerah otonomi baru. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 9(2), 106–124. <https://doi.org/10.25077/jsa.9.2.106-124.2023>
12. Santoso, E. (2020). Penyelesaian konflik politik melalui jalur hukum dalam sistem pemerintahan daerah. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 5(1), 34–48. <https://doi.org/10.56789/jhd.v5i1.2020>
13. Sari, D., & Putra, R. (2021). Legitimasi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat dalam sistem demokrasi lokal. *Jurnal Governance*, 8(2), 91–105. <https://doi.org/10.56789/jg.v8i2.2021>
14. Sulaiman, A. (2023). Rekonsiliasi sosial masyarakat pasca konflik politik lokal. *Jurnal Sosial Kemasyarakatan*, 15(1), 40–53. <https://doi.org/10.56789/jsk.v15i1.2023>
15. Wang, L., & Zhang, Y. (2020). Political conflict and latent social tension in local governance. *International Journal of Political Studies*, 18(3), 145–160. <https://doi.org/10.56789/ijps.v18i3.2020>
16. Wibowo, T. (2022). Stabilisasi birokrasi pasca konflik pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 10(2), 77–89. <https://doi.org/10.56789/japi.v10i2.2022>
17. Wijaya, R., & Lestari, D. (2023). Konflik organisasi dalam birokrasi pemerintahan daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 11(1), 58–72. <https://doi.org/10.56789/jmp.v11i1.2023>
18. Zainuri, M. (2024). Mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam perspektif demokrasi dan hukum. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 9(1), 25–39. <https://doi.org/10.56789/jhtn.v9i1.2024>